

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



Untuk segera diterbitkan

BPK Jateng telah Serahkan Seluruh LHP Semester II Tahun 2021

Selasa (11 Januari 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Vokasi dan LHP Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 semester II tahun 2021 kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah **Taj Yasin Maimoen** dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah **Ferry Wawan Cahyono**. BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga menyerahkan LHP Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kepada Bupati Sukoharjo **Etik Suryani** dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo **Wawan Pribadi** serta Wakil Wali Kota Semarang **Hevearita Gunaryanti Rahayu** dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang **Mualim**.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng **Ayub Amali** kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah. Acara penyerahan LHP diselenggarakan di auditorium lantai tiga Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Acara tersebut disaksikan secara langsung oleh pejabat struktural dan fungsional dari pemda terkait dan dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng serta secara virtual melalui zoom.

Dalam sambutannya, Ayub Amali menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan kinerja vokasi adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan tujuan pemeriksaan kinerja vaksinasi Covid-19 adalah menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada Tahun 2021.

Ayub Amali menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki terkait kinerja vokasi dan kinerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Masalah yang ditemukan terkait kinerja vokasi antara lain Pemerintah Provinsi Jateng belum meningkatkan kualitas pendidikan vokasi secara optimal dan belum mendorong penyesuaian kurikulum pada SMK secara optimal. Sedangkan beberapa masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan kinerja vaksinasi Covid-19 antara lain distribusi vaksin, logistik, dan sarana prasarana vaksin belum didukung dengan data yang valid dan mutakhir; serta pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi melalui aplikasi *PCare Vaksinasi* belum didukung data yang akurat.

Ayub mengingatkan agar pemda dapat menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diserahkan. Lebih lanjut Ayub Amali juga mengingatkan kewajiban Pemda untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 dan Ayub berharap agar capaian opini LK yang telah baik tetap dipertahankan.

Sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Jateng sudah menyerahkan LHP kinerja atas upaya penanganan sampah dan kinerja atas pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata pada Rabu (5/1/2022) serta LHP kepatuhan atas belanja modal infrastruktur dan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Kamis (6/1/2022). (*)

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbag Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Fax. 024-8660884
Email: humas.jateng@bpk.go.id